V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab. IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan perkara nomor : 237/PID.SUS/2013/PN.TK dengan terdakwa MISNI BIN SAMIRAN yang dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun telah terpenuhi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab dimana pelaku yaitu MISNI BIN SAMIRAN telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam pengaruh tekanan atau ancaman dari pihak manapun juga serta telah dapat membedakan mana yang dilarang atau tidak dilarang.
- b. Mempunyai unsur kesengajaan dimana pelaku yaitu MISNI BIN SAMIRAN telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh undang-undang/pemerintah sehingga berdasarkan Surat Ijin penangkapan yang dimiliki dan diperbolehkan adalah menggunakan jaring

dogol bukan jaring garuk seperti yang digunakan oleh pelaku. Pelaku juga telah sadar dan dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan yaitu dapat merusak ekosistem dan sumberdaya ikan serta terumbu karang yang ada dibawah laut.

- c. Perbuatan pelaku MISNI BIN SAMIRAN tersebut merupakan perbuatan yang tidak menghapus pidana karena tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi perbuatan pelaku .

2 .Pertimbangan hakim dalam memutus terbagi menjadi bersifat yuridis dan non yuridis serta pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi M. Yunus Ritonga bin Mangga Raja Ritonga yang diperiksa ternyata KM.Indosiar tidak sesuai izin tangkapannya dimana di dalm izin tangkapan ikan berupa jaring dogol namun pada saat diperiksa di bagian buritan kapal ditemukan jaring garuk kerang yang terbuat dari besi berukuran 2 meter.
- b. Keterangan terdakwa Misni Bin Samiran

Jika dikaitkan pada pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus minimal 2 bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi.

- 1.** Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Nomor Register perkara : 237/PID.SUS/PN.TK menggunakan teori keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan suatu perkara, dari teori

ratio decidendi yaitu pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian masalah dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Kiranya Pemerintah dalam hal ini instansi terkait baik pusat maupun di daerah dapat lebih memberikan sosialisasi tentang apa itu tindak pidana perikanan, apa yang dilarang dilakukan dalam menangkap ikan atau bagaimana cara menangkap ikan yang baik dan benar serta tidak akan merusak sumber daya alam bawah laut khususnya ikan dan terumbu karang, apa sanksi-sanksi yang akan diterima apa bila melanggar dan lain sebagainya, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami bagaimana menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada.
2. Kiranya aparat penegak hukum khususnya Hakim lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi dan tidak ada kompromi terhadap perkara tindak pidana perikanan yang ditanganinya mengingat begitu besar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dalam tindak pidana perikanan sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan dan tidak akan

mengulangi lagi perbuatanya karena sumberdaya alam khususnya laut yang kita nikmati saat ini adalah warisan bagi anak cucu kita nanti.